ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.8, Juli 2024

Analisis Perbandingan Administrasi Publik di Negara Singapura dan Malaysia

Yudha Dwi Saputro[1], Anggita Meylinda[2], Rinanti Andhini Putri[3], Keyka Nazfidza Labuhane[4], Muhammad Rajhi Afkar[5], Dini Gandini Purbaningrum[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: yudhaoke24@gmail.com[1], anggitameylinda266@gmail.com[2], rinanti2003@gmail.com[3], keykalabuhane@gmail.com[4], rajhiafkar04@gmail.com[5], dini.gandini@umj.ac.id[6]

Article History:
Received: 28 Juni 2024
Revised: 08 Juli 2024
Accepted: 10 Juli 2024

Keywords: *Administrasi Publik, Singapura, Malaysia.*

***Abstract**: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi komparatif untuk menganalisis administrasi publik di Singapura dan Malaysia dari segi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan di antara keduanya, seperti faktor sosial budaya, kepemimpinan, dan dinamika politik, juga menjadi fokus penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Singapura sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan yang sangat terpusat, menunjukkan keputusan administratif yang cepat tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan lokal yang beragam. Sementara itu, Malaysia, sebagai federasi dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam kebijakan regional namun menghadapi tantangan dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan. Penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana struktur administratif dan respons terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik di kedua negara ini dapat berbeda akibat dari faktor-faktor kontekstual yang berbeda.*

PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah elemen vital dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Administrasi publik memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan nasional. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin intensif, setiap negara berupaya mengoptimalkan sistem administrasi publiknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan. Studi komparatif mengenai administrasi publik antara negara-negara yang memiliki kondisi geografis, sejarah, dan sosial yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi.

Singapura dan Malaysia adalah dua negara yang berdekatan secara geografis dan memiliki sejarah yang saling terkait, namun mereka mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Singapura, sebagai negara-kota yang sangat maju, dikenal dengan sistem pemerintahan terpusat dan birokrasi yang efisien. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah mengalami transformasi luar biasa dari negara

berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Keberhasilan ini sering dikaitkan dengan pendekatan pragmatis dan meritokrasi yang diterapkan oleh pemerintahnya, yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik (Lee, 2000).

Sebaliknya, Malaysia adalah sebuah federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, dengan kompleksitas lebih dalam struktur pemerintahan dan administrasinya. Malaysia merdeka pada tahun 1957 dan telah mengalami berbagai perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Negara ini menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pusat dan negara bagian, serta antara berbagai kelompok etnis yang ada. Malaysia menerapkan berbagai kebijakan afirmatif dan pembangunan ekonomi yang berusaha untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang mempengaruhi dinamika administrasi publiknya (Mahathir, 1999).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan administrasi publik di Singapura dan Malaysia. Analisis ini difokuskan pada empat aspek utama: bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Analisis ini membantu mengungkap perbedaan dan persamaan dalam tata kelola publik di kedua negara, serta bagaimana masing-masing negara menavigasi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Bentuk negara merujuk pada struktur politik dasar dari suatu negara, apakah itu negara kesatuan atau federal. Singapura sebagai negara kesatuan memiliki kekuasaan yang terpusat, sementara Malaysia sebagai negara federal memiliki pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Bentuk pemerintahan, apakah itu republik parlementer seperti di Singapura atau monarki konstitusional seperti di Malaysia, juga mempengaruhi cara pemerintahan dijalankan dan kebijakan diimplementasikan (Easton, 1965).

Sistem pemerintahan, yang mencakup bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif diorganisir dan berinteraksi, memainkan peran penting dalam efektivitas administrasi publik. Singapura dengan sistem parlementernya memungkinkan hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, sementara Malaysia dengan karakteristik federasinya harus menavigasi hubungan yang kompleks antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sistem politik, yang mencakup suprastruktur politik seperti lembaga pemerintahan dan infrastruktur politik seperti partai politik dan kelompok kepentingan, juga memberikan konteks yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan (Almond & Powell, 1966).

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang membentuk perbedaan dalam administrasi publik antara Singapura dan Malaysia. Faktor sosial budaya, yang mencakup aspek-aspek seperti keragaman etnis dan budaya, nilai-nilai masyarakat, dan sejarah kolonial, berperan penting dalam membentuk karakteristik administrasi publik di masing-masing negara. Faktor kepemimpinan, yang mencakup visi dan strategi yang diterapkan oleh pemimpin politik dan birokrat, juga memainkan peran penting dalam menentukan arah dan efisiensi administrasi publik. Faktor politik, yang mencakup dinamika partai politik, stabilitas politik, dan kebijakan pemerintah, juga mempengaruhi cara administrasi publik dijalankan (Weber, 1922).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan administrasi publik antara Singapura dan Malaysia, dengan fokus pada aspek-aspek utama seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana faktor-faktor ini membentuk perbedaan dalam administrasi publik di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, kepemimpinan, dan politik yang berkontribusi pada perbedaan tersebut (Siddiquee, 2006). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman perbandingan administrasi publik di Singapura dan Malaysia, serta pelajaran yang

dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara lain.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi Publik atau Administrasi Negara merupakan cabang ilmu sosial yang memfokuskan pada kajian mengenai lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam konteks kehidupan bernegara. Disiplin ini mencakup berbagai aspek penting seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, serta etika dalam penyelenggaraan negara. Intinya, administrasi publik adalah bidang yang meneliti pengelolaan organisasi publik. Studi ini melibatkan analisis terhadap birokrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, manajemen pembangunan, pemerintahan daerah, prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta nilai-nilai kepublikan (publicness) atau nilai publik (public value) yang semakin signifikan saat ini (Dani, 2022).

Bentuk Negara

Bentuk negara merupakan bidang studi dalam ilmu negara yang menggambarkan struktur dasar, organisasi, dan tata tertib suatu negara yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tertinggi dalam negara tersebut serta posisi masing-masing lembaga tersebut dalam struktur kekuasaan negara (Isjwawa, 1992). Menurut Ni'matul Huda, bentuk negara dapat dibedakan menjadi 3 macam (Huda, 2012) sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan

   C.F. Strong menyatakan bahwa ciri khas utama dari negara kesatuan adalah pertama, supremasi dewan perwakilan rakyat pusat, dan kedua, absennya badan-badan yang memiliki kedaulatan lain. Pemerintahan dalam negara jenis ini diatur secara terpusat, di mana semua urusan negara berada di bawah kendali pemerintah pusat, dan semua keputusan pemerintah diambil oleh satu pusat pemerintahan yang terpusat atau oleh pusat bersama dengan organ-organ yang tersebar di daerah-daerah. Pembagian kekuasaan ini ke daerah-daerah, seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan, dikenal sebagai dekonsentrasi, di mana wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan atau sangat tergantung pada pemerintah pusat (Susanto, 2019).

2. Negara Federal atau Serikat

   Dalam negara federal, terdapat beberapa karakteristik khas yang sering dijumpai. Pertama, wilayah negara tersebut terbagi menjadi beberapa negara bagian. Kedua, terdapat kedaulatan ganda, di mana pemerintah federal dan pemerintah negara bagian memiliki otonomi masing-masing dalam menjalankan urusan pemerintahan. Ketiga, hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif (Siregar, 2023).

   Jika hubungan tersebut bersifat koordinatif, maka terdapat beberapa ciri khas. Pertama, masing-masing pihak memiliki kewenangan eksklusif. Kedua, setiap pihak memiliki susunan pemerintahan sendiri. Ketiga, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan perpajakan. Keempat, kebutuhan untuk kerja sama antara pihak-pihak tersebut sangat minimal (Sukadi, 2021).

3. Negara Konfederasi.

   Konfederasi adalah bentuk di mana kedaulatan terletak pada masing-masing negara anggota, sementara federasi menempatkan kedaulatan pada federasi itu sendiri, bukan pada negara-negara anggotanya. Menurut Kranenburg, perbedaan ini tergantung pada apakah warga negara langsung terikat oleh peraturan pusat; jika iya, itu adalah federasi, jika tidak, itu adalah

konfederasi (Arfa'i, 2013). Dalam konfederasi, negara-negara tetap merdeka dan berdaulat, dengan kelangsungan konfederasi tergantung pada kesukarelaan negara-negara anggotanya (Pelu et al., 2022).

Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan merujuk pada struktur institusi politik yang digunakan untuk mengatur suatu negara dan menegakkan kekuasaannya atas komunitas politik (Marwiyah, 2022).

1. Bentuk Pemerintahan Monarki

   Pergantian kepala negara dalam monarki dilakukan secara turun-temurun sesuai sistem warisan yang ditetapkan, seperti raja, ratu, kaisar, sultan, atau syah yang memimpin seumur hidup. Di sisi lain, dalam republik, kepala negara seperti presiden dipilih atau diangkat tanpa mengikuti sistem warisan, melainkan melalui pemilihan, perampasan kekuasaan, atau cara lainnya (Soehino 1980). Bentuk pemerintahan monarki termasuk:

   a. Monarki mutlak (absolut)

      Raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang digabungkan dalam tindakannya. Kehendak raja dianggap sebagai kehendak rakyat, dan perintahnya dianggap sebagai undang-undang yang harus ditaati, seperti yang terjadi pada Raja Louis XIV di Prancis dengan moto "L'etat C'est Moi" (negara adalah aku).

   b. Monarki konstitusional

      Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Raja tidak diperbolehkan bertindak melawan konstitusi, dan setiap tindakannya harus sesuai dengan isi konstitusi. Terjadinya monarki konstitusional bisa terjadi karena inisiatif dari raja sendiri untuk menghindari kudeta, seperti di Jepang dengan hak oktroi, atau sebagai hasil dari revolusi rakyat terhadap raja, seperti yang terjadi di Inggris dengan *Bill of Rights I* tahun 1689, dan juga terdapat di Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

   c. Monarki parlementer

      Parlemen memegang kekuasaan tertinggi, sementara raja hanya berperan sebagai simbol kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Raja tidak memiliki kekuasaan eksekutif, dan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja dalam monarki parlementer adalah sebagai kepala negara. Contoh negara yang menganut sistem ini antara lain Inggris, Belanda, dan Malaysia.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

   Terdapat tiga subvarian bentuk pemerintahan republik:

   a. Republik mutlak (absolut)

      Pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden atau diktator yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Parlemen memiliki peran yang minim, dan konstitusi sering diabaikan untuk melegitimasi kekuasaan.

   b. Republik konstitusional

      Presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan, namun kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Parlemen melakukan pengawasan efektif terhadap pemerintahan.

   c. Republik parlementer:

      Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada kekuasaan eksekutif (Sampe, 2022).

Sistem Pemerintahan

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

   Sistem presidensial, juga dikenal sebagai sistem kongresional, adalah bentuk pemerintahan republik dimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih langsung melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, kedua badan tersebut beroperasi secara independen satu sama lain, berbeda dengan sistem parlementer yang memiliki hubungan yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif (Bastian, 2015).

   Negara yang menganut sistem presidensial mengadakan dua jenis pemilihan umum. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Kedua, pemilihan anggota parlemen atau DPR, yang biasanya diadakan setelah pemilihan presiden. Dengan demikian, pertimbangan politik terhadap presiden yang terpilih telah mempengaruhi proses pemilihan anggota DPR (Basyaib, 2006).

   Bagir Manan menjelaskan bahwa sistem presidensial merupakan subsistem dari pemerintahan republik dan hanya berlaku dalam negara-negara dengan bentuk republik. Prinsip-prinsip utama dalam sistem presidensial mencakup pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana presiden berperan sebagai eksekutif tunggal yang kekuasaannya tidak terbagi. Presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, serta memiliki wewenang untuk menunjuk menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Di dalam sistem presidensial, anggota parlemen dilarang untuk menjabat di dalam pemerintahan, dan sebaliknya, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen. Pemerintahan dalam sistem presidensial bertanggung jawab langsung kepada rakyat (Manan, 2003).

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

   Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden biasanya hanya berperan sebagai simbol kepala negara. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya, yang bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Sistem ini ditandai dengan kurangnya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, dan perdana menteri dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen (Taufik, 2020).

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara sistem presidensial dan parlementer terletak pada struktur kekuasaan dan hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara.

Sistem Politik

Infrastruktur politik dapat dipahami sebagai jaringan lembaga dalam masyarakat yang mencakup LSM, partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan tokoh politik yang beroperasi secara independen (Risnawan, 2017). Di sisi lain, struktur politik mencakup infrastruktur politik tersebut serta lembaga politik dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai suprastruktur politik. Proses politik merupakan hasil interaksi antara lembaga-lembaga ini dalam sistem politik (Kadir, 2014).

Infrastruktur politik tidak hanya mencakup kelompok-kelompok kepentingan seperti petani, nelayan, serikat buruh, dan organisasi pemuda, tetapi juga mencakup partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Perjuangan (Risnawan, 2017). Di sisi lain, suprastruktur politik melibatkan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga lain yang dikelola pemerintah (Kadir, 2014).

Fungsi utama infrastruktur politik adalah merumuskan dan menyalurkan kepentingan masyarakat kepada lembaga-lembaga suprastruktur politik. Suprastruktur politik kemudian

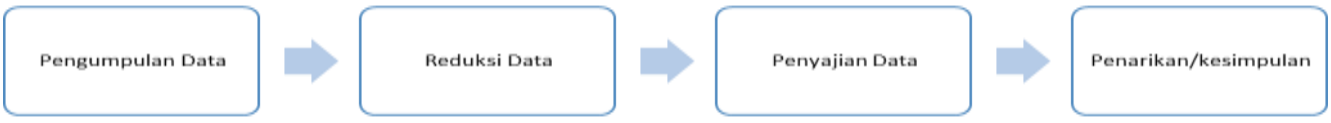
memproses kepentingan ini untuk mencapai keputusan bersama, yang didasarkan pada aspirasi dan dukungan masyarakat. Keputusan-keputusan ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat sebagai nilai-nilai otoritatif yang berada dalam wewenang pemerintah (Kadir et al., 2014). Dengan demikian, hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik sangatlah erat, saling berhubungan, kohesif, dan interdependen untuk menjaga keberlangsungan totalitas sistem politik suatu negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran mendalam mengenai administrasi publik di Singapura dan Malaysia, dengan fokus pada perbandingan aspek-aspek penting seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Data akan diperoleh dari studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel akademik, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Studi literatur menjadi sumber utama untuk mengumpulkan informasi mengenai administrasi publik di kedua negara. Buku dan jurnal akademik akan memberikan landasan teori yang diperlukan untuk memahami perkembangan sistem pemerintahan dan administrasi publik di Singapura dan Malaysia. Artikel akademik dan laporan resmi memberikan data terkini dan analisis kritis tentang praktik administrasi publik, kebijakan, dan dinamika politik di kedua negara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam administrasi publik Singapura dan Malaysia. Analisis ini melibatkan penilaian kritis terhadap faktor-faktor yang membentuk perbedaan tersebut, termasuk faktor sosial budaya, kepemimpinan, dan politik.

Sugiyono mengemukakan bahwa ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009). Data-data yang telah dikumpulkan direduksi dan disajikan secara deskriptif. Setelah data disajikan secara deskriptif, data tersebut dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Administrasi Publik di Negara Singapura dan Malaysia Bentuk Negara:

Tabel 1. Administrasi Publik Singapura dan Malaysia

No	Administrasi Publik	Singapura	Malaysia
1	Bentuk Negara	Negara Kesatuan	Negara Federal / Serikat
2	Bentuk Pemerintahan	Bentuk Pemerintahan Republik	Bentuk Pemerintahan Parlementer
3	Sistem Pemerintahan	Sistem Pemerintahan Parlementer	Sistem Pemerintahan Parlementer
4	Sistem Politik	Sistem politiknya terpusat	Sistem Politiknya terbagi atas negara bagiannya dan memiliki asas otonomi

Bentuk Negara

Singapura, sebagai negara kesatuan yang sangat terpusat, memiliki sejarah yang menonjol sejak merdeka pada tahun 1965. Semua keputusan administratif dan kebijakan utama dibuat oleh pemerintah pusat tanpa adanya distribusi kekuasaan yang signifikan kepada pemerintah daerah (Siregar & Harahap, 2024). Struktur ini mencerminkan pendekatan terpusat dalam pengambilan keputusan, yang dapat memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan global dan domestik namun juga dapat menimbulkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Di sisi lain, Malaysia adalah sebuah federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Sistem federal Malaysia membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, dengan masing-masing memiliki otonomi dalam bidang-bidang tertentu seperti agama dan pendidikan (Kamarulzaman, 2018). Struktur ini memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal, yang dapat mengakomodasi keberagaman budaya, bahasa, dan agama di Malaysia.

Perbedaan ini menghasilkan konsekuensi yang berbeda dalam administrasi publik kedua negara. Singapura, dengan struktur pemerintahan yang terpusat, cenderung memiliki keputusan yang lebih cepat dan efisien dalam pengelolaan kebijakan nasional. Hal ini didukung oleh birokrasi yang efisien dan visi pemerintahan yang kuat terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Namun, kebijakan yang terpusat dapat kurang responsif terhadap variasi kebutuhan daerah, yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

Sementara itu, Malaysia sebagai negara federasi menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda. Dengan sistem federal, negara ini dapat lebih mudah mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan daerah yang beragam, serta memberikan ruang bagi inisiatif dan pengembangan kebijakan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi setempat. Sistem ini dapat menciptakan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun juga memungkinkan percobaan kebijakan yang bersifat kedaerahan (Means, 2020).

Dengan demikian, perbedaan dalam bentuk negara dan struktur pemerintahan antara Singapura dan Malaysia tidak hanya mempengaruhi tata kelola administratif mereka, tetapi juga mempengaruhi cara mereka merespons dan mengelola tantangan serta peluang di tingkat nasional maupun regional.

Bentuk Pemerintahan

Singapura adalah sebuah negara dengan bentuk republik. Negara ini memiliki seorang Presiden sebagai kepala negara, yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Presiden. Menurut Undang-Undang Presiden, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setiap enam tahun melalui

pemilihan umum. Di sisi lain, Perdana Menteri, sebagai pemimpin kabinet yang bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari, dipilih dari kepemimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen (Pamungkas, 2022).

Di sisi lain, bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional di mana kepala negara, Yang di-Pertuan Agong, dipilih secara bergilir dari sembilan Sultan negara bagian Malaysia setiap lima tahun. Meskipun secara formal kepala negara, peran Yang di-Pertuan Agong lebih bersifat seremonial dan simbolis, dengan kekuasaan eksekutif sehari-hari dipegang oleh Perdana Menteri (Abdullah, 2019). Perdana Menteri Malaysia, seperti di Singapura, dipilih dari anggota parlemen setelah pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pembuatan keputusan eksekutif.

Perbedaan dalam bentuk pemerintahan ini mencerminkan perbedaan dalam struktur politik dan kelembagaan kedua negara. Singapura, dengan sistem republik parlementer yang lebih langsung dan terfokus pada pemilihan langsung presiden, menunjukkan komitmen terhadap representasi langsung rakyat dalam kepala negara (George, 2017). Namun, kekuasaan presiden yang terbatas dalam proses legislatif menandakan pentingnya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem parlementer.

Di Malaysia, monarki konstitusional dengan kepala negara yang dipilih secara bergilir mencerminkan tradisi historis dan budaya yang kuat di negara itu, dengan peran seremonial Yang di-Pertuan Agong yang mengandalkan konsensus di antara Sultan sebagai kepala negara (Jayakumar, 2020). Perdana Menteri Malaysia memegang peran utama dalam pembuatan keputusan eksekutif yang menunjukkan penggabungan sistem monarki tradisional dengan demokrasi parlementer yang pragmatis.

Dengan demikian, perbedaan dalam bentuk pemerintahan antara Singapura dan Malaysia tidak hanya mencerminkan tradisi politik dan kelembagaan mereka, tetapi juga mempengaruhi cara mereka menjalankan kekuasaan eksekutif dan menjawab tantangan politik dan sosial yang berbeda dalam konteks regional dan global.

Sistem Pemerintahan

Singapura menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang sangat terpusat. Dalam sistem ini, eksekutif, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, berasal dari anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Perdana Menteri bertanggung jawab atas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan membentuk kabinet. Sebagai negara republik, kepala negara adalah seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama enam tahun. Meskipun formalnya jabatan Presiden memiliki kewenangan tertentu, sebagian besar kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya.

Partai Aksi Rakyat (PAP) telah mendominasi politik Singapura sejak kemerdekaannya pada tahun 1965. Dominasi ini mencerminkan stabilitas politik yang kuat dan konsistensi dalam arah kebijakan negara. PAP dikenal karena fokusnya pada pembangunan ekonomi, tata kelola yang efisien, dan keamanan nasional, yang telah membawa Singapura dari negara miskin menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia (Tan, 2009).

Di Malaysia, sistem pemerintahan juga bersifat parlementer, tetapi dengan karakteristik federasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan 13 negara bagian serta 3 wilayah federal. Konstitusi Malaysia membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, dengan masing-masing memiliki yurisdiksi tertentu yang dijamin oleh hukum dasar. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih secara bergilir dari sembilan Sultan negeri-negeri Melayu. Meskipun perannya lebih seremonial, Yang di-Pertuan Agong memiliki peran

penting dalam beberapa aspek tertentu dari pemerintahan, termasuk penunjukan Perdana Menteri. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Dalam sejarah politik Malaysia, Barisan Nasional (BN) telah mendominasi pemerintahan untuk sebagian besar periode pasca-kemerdekaan hingga 2018, ketika koalisi yang lebih dinamis, Pakatan Harapan, berhasil memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan baru. Dinamika politik ini mencerminkan pluralitas politik yang lebih besar dibandingkan dengan Singapura, meskipun masih ada tantangan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah pusat dan negara bagian (Means, 1991).

Perbandingan antara sistem pemerintahan Singapura dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang krusial dalam struktur kekuasaan dan stabilitas politik. Singapura dengan sistem yang sangat terpusat dan dominasi politik yang kuat oleh PAP menawarkan stabilitas politik yang tinggi dan kebijakan yang konsisten, yang mendukung pembangunan ekonomi yang cepat dan efisien.

Di sisi lain, Malaysia dengan sistem federasi menunjukkan dinamika politik yang lebih kompleks dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Dominasi politik yang telah lama dipegang oleh BN, dan sekarang berubah dengan kehadiran koalisi yang lebih dinamis, mencerminkan keragaman politik yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas dan kohesi nasional.

Secara keseluruhan, meskipun keduanya menerapkan sistem pemerintahan parlementer, Singapura dan Malaysia menawarkan model yang berbeda dalam pembagian kekuasaan, stabilitas politik, dan dinamika kebijakan. Faktor ini mempengaruhi tidak hanya tata kelola politik dan ekonomi mereka, tetapi juga prospek mereka dalam menghadapi tantangan masa depan seperti globalisasi dan perubahan politik regional.

Sistem Politik

1. Suprastruktur Politik

   Singapura memiliki suprastruktur politik yang sangat terpusat dan efisien. Pemerintahan di Singapura didominasi oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) sejak kemerdekaannya pada tahun 1965. PAP tidak hanya memegang mayoritas kursi di parlemen tetapi juga memonopoli kekuasaan eksekutif dan legislatif secara luas. Keefisienan pemerintahan Singapura memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan implementasi kebijakan yang efektif, meskipun hal ini juga membatasi keragaman opini politik dan alternatif politik yang kuat di tingkat nasional.

   Di Malaysia, suprastruktur politik lebih kompleks karena negara ini adalah sebuah federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih secara bergiliran dari sembilan Sultan di Malaysia, dan pemerintah negara bagian yang memiliki otonomi dalam bidang-bidang tertentu seperti agama dan pendidikan. Sistem monarki konstitusional di Malaysia memberikan dimensi tambahan dalam suprastruktur politiknya, di mana Sultan-sultan memiliki peran simbolis yang kuat dalam menstabilkan politik dan masyarakat.

2. Infrastruktur Politik

   Infrastruktur politik Singapura melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilihan umum yang kompetitif, meskipun dominasi PAP secara politik telah menghasilkan perdebatan tentang pluralisme politik di negara ini. Meskipun demikian, kestabilan politik yang dihasilkan telah memungkinkan Singapura untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabilitas sosial yang tinggi.

Infrastruktur politik Malaysia mencakup sistem multipartai yang kompleks dengan berbagai koalisi politik yang berubah-ubah. Barisan Nasional (BN) dan koalisi-kelasnya yang sebelumnya dominan menghadapi tantangan dari koalisi yang lebih dinamis seperti Pakatan Harapan (PH) dan Parti Warisan Sabah (Warisan). Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik Malaysia menunjukkan tingkat pluralisme yang lebih tinggi dibandingkan Singapura, meskipun proses ini dapat menjadi rumit dan memperlambat pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura dan Malaysia menggunakan sistem politik parlementer, perbedaan dalam suprastruktur dan infrastruktur politik mereka memberikan dampak yang serius terhadap dinamika politik dan administratif kedua negara. Singapura, menawarkan kestabilan politik yang tinggi dan efisiensi administratif. Namun, hal ini juga dapat membatasi keragaman politik dan alternatif opini dalam proses keputusan politik nasional. Di sisi lain, Malaysia dengan federasinya menunjukkan pembagian kekuasaan yang lebih kompleks antara pemerintah pusat dan negara bagian, yang memberikan ruang lebih besar untuk pluralisme politik dan variasi dalam implementasi kebijakan regional. Meskipun kompleksitas ini dapat mengakibatkan tantangan dalam koordinasi dan konsistensi kebijakan nasional, infrastruktur politik yang dinamis memungkinkan untuk inklusi yang lebih luas dari berbagai kelompok kepentingan dalam proses politik.

Analisis Faktor Yang Membedakannya:

1. Faktor Sosial-budaya

Singapura dikenal sebagai negara yang multikultural dengan populasi yang beragam etnis seperti Cina, Melayu, India, dan lainnya. Kebijakan pemerintah Singapura sering kali berfokus pada harmoni sosial dan integrasi sosial. Hal ini tercermin dalam pendekatan untuk menjaga stabilitas sosial melalui kebijakan seperti Housing Development Board (HDB) yang didesain untuk menciptakan lingkungan hunian yang terintegrasi secara etnis dan sosial. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam mempromosikan identitas nasional yang kohesif, memperlakukan semua etnis dengan adil dan memfasilitasi pembangunan komunitas yang inklusif (Tan, 2016).

Malaysia juga memiliki komposisi etnis yang beragam, dengan populasi utama terdiri dari etnis Melayu, Cina, India, dan kelompok Bumiputera lainnya. Perbedaan signifikan terletak pada kebijakan afirmatif yang diperkenalkan melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. DEB bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan non-Melayu dengan memberikan keistimewaan ekonomi kepada etnis Melayu dan Bumiputera melalui berbagai insentif seperti kuota pendidikan dan kepemilikan bisnis (Hussein, 2006). Pendekatan ini telah mempengaruhi dinamika sosial dan politik di Malaysia, menciptakan keseimbangan antara kepentingan etnis dan integrasi nasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura dan Malaysia sama-sama multikultural, pendekatan mereka terhadap manajemen diversitas etnis berbeda. Singapura mengedepankan pendekatan inklusif yang menekankan harmoni rasial dan integrasi sosial melalui kebijakan yang merata untuk semua etnis. Ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip meritokrasi dan kesetaraan, yang mendorong stabilitas sosial dan kohesi nasional.

Di sisi lain, Malaysia menggunakan kebijakan afirmatif seperti DEB untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang berdasarkan etnis, dengan memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu dan Bumiputera. Pendekatan ini, sementara bertujuan untuk mencapai inklusi

ekonomi, telah menimbulkan debat dan tantangan dalam hal integrasi sosial dan kesatuan nasional. Pemahaman Tentang perbedaan ini penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan sosial budaya terhadap stabilitas politik, integrasi sosial, dan pengembangan masyarakat yang adil dan inklusif di kedua negara ini.

2. Faktor Kepemimpinan

Singapura telah dipengaruhi secara signifikan oleh visi Lee Kuan Yew dalam pembangunan ekonomi dan efisiensi pemerintahan. Lee Kuan Yew, sebagai pendiri Singapura modern, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi sebagai fondasi kestabilan dan kemakmuran negara. Pemimpin-pemimpin Singapura yang mengikuti Lee Kuan Yew meneruskan pendekatan pragmatis ini dengan mempertahankan penekanan pada meritokrasi dan tata kelola yang baik sebagai pilar keberhasilan administratif dan ekonomi mereka (Barr, 2014).

Di sisi lain, Malaysia mengalami pergantian pemimpin yang membawa visi politik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Mahathir Mohamad, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dalam dua periode yang berbeda, dikenal dengan kebijakan industrialisasinya yang ambisius untuk memodernisasi sektor ekonomi Malaysia. Namun, pergantian ini sering kali mengubah arah kebijakan negara, tergantung pada agenda politik dan ekonomi masing-masing pemimpin yang terpilih. Contohnya adalah periode kepemimpinan Najib Razak, yang dikenal dengan kebijakan transformasi ekonominya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program seperti 1Malaysia dan Transformasi Nasional (Gomez, 2018).

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa Singapura cenderung menjaga kontinuitas dalam pendekatan kepemimpinan yang stabil dan berorientasi pada pembangunan ekonomi, sementara Malaysia menghadapi tantangan dinamika politik yang lebih bervariasi dengan pergantian pemimpin yang dapat mempengaruhi secara signifikan arah kebijakan negara.

3. Faktor Politik

Singapura menunjukkan stabilitas politik yang tinggi yang didorong oleh dominasi Partai Aksi Rakyat (PAP) yang kuat sejak kemerdekaannya. PAP tidak hanya mengontrol pemerintahan tetapi juga memainkan peran sentral dalam mengatur kebijakan ekonomi dan sosial negara. Stabilitas ini sebagian besar dipertahankan melalui kontrol yang ketat terhadap partai oposisi dan peraturan politik yang mengatur proses demokratisasi (Quah, 2017). Di sisi lain, Malaysia mengalami dinamika politik yang lebih bervariasi dengan adanya kompetisi antara beberapa partai politik utama. Meskipun memiliki sejarah stabil sejak kemerdekaannya, pergantian pemimpin dan sistem multipartai telah memberikan platform untuk pandangan politik yang lebih beragam dan kadang-kadang menantang untuk mencapai konsensus politik yang kohesif (Means, 2020).

Singapura cenderung memiliki dinamika politik yang lebih terkendali dan diarahkan secara lebih langsung oleh pemerintah melalui kontrol yang ketat terhadap partai politik dan proses politik. Ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang berfokus pada stabilitas politik sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang kuat (Barr, 2014). Sebaliknya, Malaysia menunjukkan dinamika politik yang lebih fluid dengan adanya sistem multipartai yang memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik untuk bersaing dan berkoalisi. Meskipun ini menciptakan ruang untuk perubahan politik yang lebih cepat dalam menanggapi tuntutan masyarakat, hal ini juga dapat menyulitkan pencapaian konsensus politik yang stabil dan berkelanjutan.

Singapura sering kali dikarakterisasi oleh adaptabilitas yang kuat terhadap perubahan

sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Pendekatan pemerintah yang pragmatis dan fokus pada meritokrasi telah memungkinkan negara ini untuk tetap relevan dan kompetitif di tingkat internasional (Barr, 2014). Di Malaysia, respons terhadap tuntutan sosial dan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berubah, di mana pergantian kepemimpinan membawa visi dan prioritas yang berbeda. Meskipun ini dapat mempercepat inovasi dan respons terhadap perubahan, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpastian politik yang mempengaruhi kestabilan jangka panjang.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura dan Malaysia berbagi beberapa karakteristik politik yang serupa, seperti sistem parlementer, mereka juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan terhadap stabilitas politik, dinamika kompetisi politik, dan respons terhadap tuntutan sosial dan ekonomi. Singapura cenderung menekankan stabilitas politik dan efisiensi dalam pemerintahan, sementara Malaysia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai konsensus politik yang kohesif di tengah dinamika multipartai yang kompleks.

KESIMPULAN

Singapura memiliki suprastruktur politik yang sangat terpusat dan efisien, didominasi oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) sejak kemerdekaannya. PAP tidak hanya menguasai mayoritas kursi di parlemen tetapi juga memiliki kontrol luas atas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini memungkinkan Singapura untuk membuat keputusan cepat dan efektif namun juga dapat membatasi keragaman politik dan alternatif opini yang kuat. Di Malaysia, suprastruktur politik lebih kompleks sebagai federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong dan pemerintah negara bagian yang memiliki otonomi dalam bidang-bidang tertentu. Sistem monarki konstitusional dengan peran simbolis Sultan-sultan menambah dimensi politik Malaysia, memberikan stabilitas tambahan dalam suprastruktur politik. Infrastruktur politik Singapura melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilihan umum yang kompetitif, meskipun dominasi politik PAP menimbulkan debat tentang pluralisme politik. Di sisi lain, Malaysia memiliki sistem multipartai yang kompleks dengan berbagai koalisi politik yang berubah-ubah, menunjukkan tingkat pluralisme yang lebih tinggi dan proses politik yang dinamis. Perbandingan ini menyiratkan bahwa Singapura menawarkan stabilitas politik tinggi dan efisiensi administratif, sementara Malaysia memiliki infrastruktur politik yang lebih dinamis dengan ruang lebih besar untuk pluralisme politik. Kompleksitas ini mempengaruhi cara kedua negara merespons dan mengelola tantangan serta peluang dalam konteks regional dan global.

Singapura dan Malaysia, sebagai negara-negara multikultural dengan populasi yang beragam etnis, memiliki pendekatan yang berbeda dalam manajemen diversitas etnis dan politik. Singapura menekankan integrasi sosial dan harmoni sosial melalui kebijakan inklusif seperti *Housing Development Board* (HDB) dan promosi identitas nasional yang kohesif. Di sisi lain, Malaysia menggunakan kebijakan afirmatif melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara etnis Melayu dan non-Melayu dengan memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu dan Bumiputera. Perbedaan ini dalam pendekatan sosial-budaya mencerminkan stabilitas politik yang berbeda, dengan Singapura cenderung memiliki stabilitas politik yang kuat dan kontrol yang ketat terhadap proses politik, sedangkan Malaysia menghadapi tantangan dalam mencapai konsensus politik yang kohesif di tengah dinamika multipartai yang kompleks.

DAFTAR REFERENSI

Bastian, Radis. (2015). *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*.

Basyaib, Hamid. (2006). *Membela Kebebasan, Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*.

D, Rahmian. (2022). *Reformasi Administrasi Publik*. Pasaman Barat: Cv Azka Pustaka.

F, Isjwara. (1992). *Pengantar Ilmu Politik, Bandung*. Jakarta: Binacipta.

F, Rahman. (2021). *Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*.

Huda, Ni'matul. (2012). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Lan, Liem Siok. (2008). *Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jenderal Tni*. Jakarta: Yayasa Obor Indonesia.

M, Siti. (2023). *Analisis Bentuk Pemerintahan Di Lingkup Negara Asean*.

Manan, Bagir. (1999). *Lembaga Kepresidenan Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Uii Dengan Gama Media*.

Manan, Bagir. (2003). *Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Fh-Uii Press.*

Bentuk, Pengertian D. A. N., Negara, Bentuk, Otonomi, Konsepsi, Sebagai, Daerah, Pilihan, Alternatif, Tuntutan, Dari, Negara, Bentuk, & Di, Federal. (N.D.). *Gabriel, "Pengertian Dan Bentuk - Bentuk Negara." Ginting, "Konsepsi Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia."*

Carlos, Roberto, & Siregar, Veriero. (2023). Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan. *Journal Of Islamic Law El Madani E*, *2*, 87–97.

Maulida, Anisa Syifa, Sepkamala, Diva Deda, Herayani, Safdha, & Ikrima, Wilda Haifa. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publiknegara Inggris Dan Australia. *Pentahelix*, *1*(2), 163. Https://Doi.Org/10.24853/Penta.1.2.163-174

Munawar, Apep. (2023). Identifikasi Budaya Di Region Asia Tenggara. *Jurnal Samudra Geografi*, *6*(1), 13–18. Https://Doi.Org/10.33059/Jsg.V6i1.7328

Pamungkas, Fikry Z. (N.D.). Sistem Pemerintahan Singkat 10 Negara As. *Academia.Edu*.

Risnawan, Wawan. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, *4*(3), 511–518.

S, Sampe. (2022). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*.

Siregar, Muklis, & Harahap, Elly Warnisyah. (2024). *Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi*. *6*(4), 10181–10189.

Arfa'i. (2013). Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(7), 142–155.